H. ARIEF R. WISMANSYAH
WALIKOTA TANGERANG

H. SACHRUDIN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2014

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat, yang secara teknis penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyampaian Informasi dan Tanggapan atas Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2014 merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2014.

B. Tujuan

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2014 untuk mendapatkan tanggapan balik (feed back) dari masyarakat berupa tanggapan atau saran secara lisan dan/atau tertulis dengan tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

III. Ruang Lingkup

1. Substansi/Materi

Muatan ILPPD merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. Urusan Desentralisasi, yang berupa penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

b. Tugas Pembantuan, yang meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

c. Tugas Umum Pemerintahan, yang berupa kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai permasalahan dan solusinya.

2. Wilayah

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota Tangerang.

3. Waktu

ILPPD yang diinformasikan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2014.

IV. Gambaran Umum Daerah

A. Kondisi Geografis

Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993. Berada di bagian Timur Provinsi Banten, merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2011, luas wilayah Kota Tangerang adalah ± 184,24 km² (termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, seluas ± 19,69 km²).

Kota Tangerang berjarak ±60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ±27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Dinamisnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh sarana dan jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang, berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

•	Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
•	Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong dan Pondok Aren Kabupaten Tangerang
•	Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan DKI Jakarta
•	Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

B. Wilayah Administrasi Kota Tangerang

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, secara administratif Kota Tangerang terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Dengan total jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 985 dan Rukun Tetangga sebanyak 4.[illegible]. Distribusi luas wilayah dan jumlah kelurahan berdasarkan wilayah kecamatan seperti pada gambar berikut:

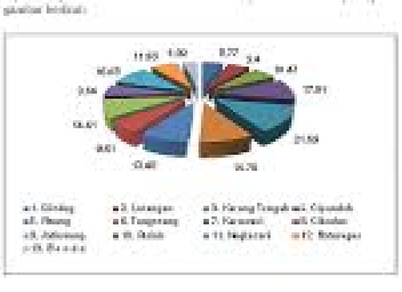

C. Gambaran Umum Demografis

Gambaran umum demografis Kota Tangerang bisa dilihat melalui berbagai data/informasi, yang terkait dengan kependudukan, yaitu antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, usia dan suku, dll, seperti terlihat pada gambar berikut:

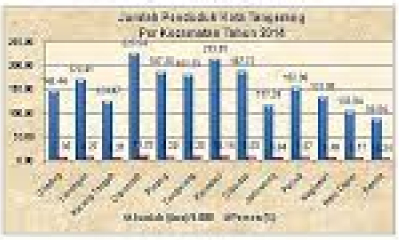

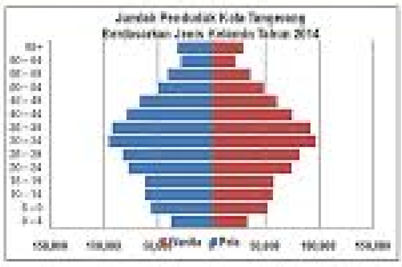

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Jumlah Penduduk Kota Tangerang relatif seimbang antara perempuan dengan laki-laki dengan bentuk piramida penduduk yang menggambarkan adanya proporsi penduduk produktif (20-34 tahun) yang tinggi serta harapan hidup yang meningkat. Sementara itu, dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk selama Tahun 2014 terlihat bahwa Kecamatan Cibodas dan Tangerang masing-masing merupakan kecamatan yang mempunyai LPP tertinggi dan terendah. Kecamatan Cipondoh dan Benda masing-masing merupakan kecamatan yang paling banyak dan paling sedikit jumlah penduduknya, serta Kecamatan Cibodas dan Jatiuwung masing-masing merupakan kecamatan yang paling padat dan paling jarang penduduknya. Hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah tentang fungsi wilayah baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai kawasan industri daerah.

Selain itu, perkembangan kependudukan Kota Tangerang jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangannya selama Tahun 2014 bisa dilihat pada gambar berikut ini:

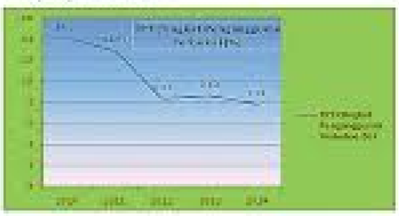

Berdasarkan gambar di atas, pada Tahun 2014 secara umum ketenagakerjaan di Kota Tangerang relatif stabil (tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan). Hal ini terkait dengan kondisi Kota Tangerang yang relatif aman dan terkendali. Dengan melihat hal tersebut, maka masih memungkinkan adanya kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di berbagai sektor usaha di Kota Tangerang.

D. Gambaran Perekonomian Daerah

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Perekonomian daerah dapat menjadi refleksi dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi daerah akan menjadi faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, investasi dan penggunaan tenaga kerja di lapangan usaha dalam kerangka ekonomi daerah.

Perkembangan perekonomian di wilayah Kota Tangerang beserta pertumbuhan dan perkembangannya yang ditunjukkan pada berbagai indikator perekonomian daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB, Laju Inflasi Harga, dll) selama Tahun 2014 bisa dilihat sebagai berikut:

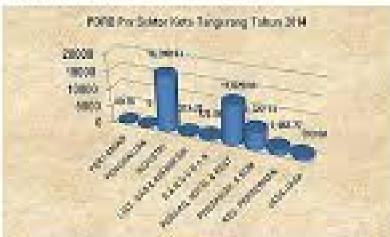

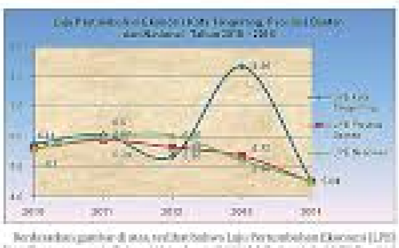

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 5,8?% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten (5,01) dan LPE Nasional (5,0?%). Jika dilihat dari kecenderungannya, LPE Kota Tangerang dari Tahun 2010-2014 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi Banten dan LPE Nasional. Pertumbuhan sektor terbesar dan terkecil adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (10,39%) dan Sektor Pertambangan (-5,85%), sedangkan kontribusi terbesar dan terkecil adalah sektor industri pengolahan (42,97%) dan Sektor Pertanian (0,10%). Sementara itu terlihat bahwa laju inflasi Kota Tangerang pada Tahun 2014 sebesar 10,83% yang merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun namun masih di bawah perkiraan RPJMD (10,15%).

Mengenai investasi, berikut disajikan tabel perkembangan investasi di Kota Tangerang pada PMDN dan PMA selama Tahun 2010-2014 yang secara umum relatif meningkat setiap tahunnya.

Tabel Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Kota Tangerang Tahun 2010-2014

Tahun	Uraian		Perusahaan PMA	Perusahaan PMDN	Jumlah
2010	Jumlah Perusahaan		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Investasi	US$	[illegible]	-	[illegible]
		Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2011	Jumlah Perusahaan		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Investasi	US$	[illegible]	-	[illegible]
		Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2012	Jumlah Perusahaan		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Investasi	US$	[illegible]	-	[illegible]
		Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2013	Jumlah Perusahaan		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Investasi	US$	[illegible]	-	[illegible]
		Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2014*	Jumlah Perusahaan		[illegible]	-	[illegible]
	Investasi	US$	[illegible]	-	[illegible]
		Rupiah	[illegible]	-	[illegible]

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, 2014
*) angka sementara

V. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah (Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Prioritas Daerah)

Arah kebijakan umum Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, diarahkan untuk pencapaian visi dan misi daerah berupa:

VISI:

"TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH"

Misi:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;

3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;

4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas;

5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Upaya pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan melalui 8 strategi umum serta 7 arah kebijakan daerah dengan 11 prioritas pembangunan.

VI. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut disampaikan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk pada Tahun Anggaran 2014.

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2014.

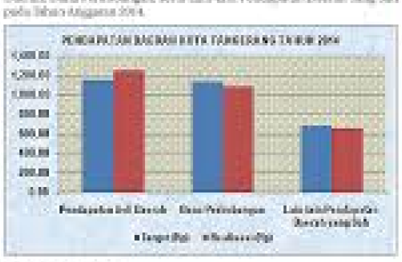

2. Belanja Daerah

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada Tahun Anggaran 2014.

3. Pembiayaan

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah, berikut ini disajikan rencana/target dan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2014.

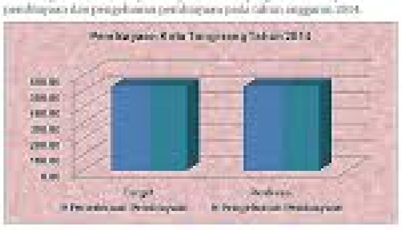

VII. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan yang diterjemahkan ke dalam pembagian urusan pemerintahan (urusan wajib dan pilihan), serta program/kegiatan pembangunan beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan RKPD Kota Tangerang merupakan turunan (derivasi) dan operasionalisasi tahunan dari RPJMD Kota Tangerang yang memuat rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari program/kegiatan dan pagu anggaran beserta indikator dan target-targetnya selama jangka waktu 1 tahun.

Dalam rangka pencapaian visi misi dan 11 prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2014, melaksanakan 32 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, dengan jumlah program sebanyak 147 program dan 1.460 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.[illegible].

Upaya-upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diklasifikasikan dalam urusan-urusan wajib dan pilihan seperti yang tercantum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014

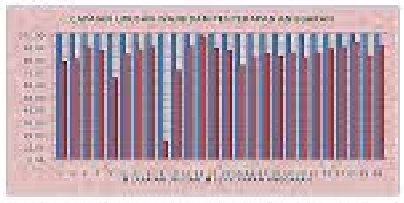

B. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014

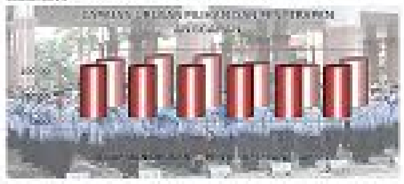

B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, dapat dirincikan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Tahun	Instansi Tugas	Dasar Hukum
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara optimal. Tugas tersebut terkait kepada kebutuhan masyarakat akan adanya pemerintahan yang mampu mewujudkan kualitas dan mencerdaskan kehidupan serta mensejahterakan masyarakat. Pelaporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilakukan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 meliputi tugas umum sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kota Tangerang telah dilaksanakan kegiatan yaitu penyelenggaraan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

D. Penghargaan yang diterima Kota Tangerang

Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai antara lain:

No	Penghargaan
1.	[illegible]
2.	[illegible]
3.	[illegible]
4.	[illegible]
5.	[illegible]
6.	[illegible]
7.	[illegible]
8.	[illegible]
9.	[illegible]

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2014, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.